

# Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor Dalam Pengamanan Obyek Vital Nasional Sektor Industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa Bogor Berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2017

Euis Maryam<sup>1</sup>, Hidayat Rumatiga<sup>2</sup>, Saddam Husein

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [euismaryam98@gmail.com](mailto:euismaryam98@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [hidayat.rumatiga@unida.ac.id](mailto:hidayat.rumatiga@unida.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [saddam.husein@unida.ac.id](mailto:saddam.husein@unida.ac.id)

---

---

## ABSTRAK

Objek Vital Nasional yang disingkat Obvitnas adalah bagian vital negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional, pemegang hajat hidup orang banyak, apabila terjadi ancaman kepadanya dapat menyebabkan mudharat atau bahaya pada negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa. Penelitian ini mengumpulkan data melalui kepustakaan dan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan hasil riset orang lain. Dan didukung oleh data empiris yang dipereolah dari observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa Bogor berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2017 yang meliputi rangkaian kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan atau preemptif dengan berkoordinasi dengan pihak pengelola obvitnas, kegiatan pencegahan yang dilakukan melalui pengawalan barang, patroli, dan kegiatan represif yaitu tindakan menolong orang yang menjadi korban, melakukan pendataan sanksi, dan mengamankan barang bukti dan pelaku bila ditangkap di TKP. Kendala yang ditemui Polri pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa yaitu (1) belum adanya sistem pengamanan yang efektif dalam pengamaman obvitnas. (2) Kurangnya personil, (3) Sarana dan prasarana yang belum memadai.

**Kata Kunci:** Unit Pam Obvit, Pengamanan, Obyek, Vital, Industri.

## PENDAHULUAN

Objek Vital Nasional yang disingkat Obvitnas adalah bagian vital negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional, sebagai pemegang hajat hidup orang banyak, yang apabila terjadi ancaman

kepadanya dapat menyebabkan mudharat atau bahaya pada negara dan masyarakat.

Dalam Kepres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional disebutkan Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Objek Vital Nasional tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang banyak, obvitnas dapat dipahami sebagai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan industri yang merupakan perusahaan negara maupun swasta yang berperan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak merupakan obvitnas. Salah satunya ialah PT. Indocement Tunggal Prakarsa.

PT. Indocement Tunggal Prakarsa adalah salah satu perusahaan yang memproduksi semen, beton siap pakai, dan tambang agregat. Bila dilihat dari jenis bahan yang diproduksi maka tentunya hasil produksi sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam masyarakat karena masyarakat selalu membutuhkan semen dalam membangun berbagai jenis bangunan.

PT. Indocement Tunggal Prakarsa sebagai satu objek vital nasional karena dapat menyumbangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam bentuk pajak yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan masyarakat, seperti membayar gaji ASN, membiayai proyek pembangunan nasional dan termasuk daerah.

Oleh karena obvitnas memiliki peran yang cukup penting dalam mempertahankan perekonomian nasional, maka harus dilindungi secara baik oleh negara melalui lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri.

Secara umum, Polri memiliki tugas sebagai pelindung masyarakat, menjaga agar keamanan selalu terwujud dalam masyarakat, berusaha agar selalu tertib kehidupan berbangsa dan bernegara, menegakkan hukum, dan turut menciptakan keamanan obvitnas guna mewujudkan kesejahteraan, karena Polri merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin perlindungan semua warga negara.

Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi seluruh warga negara.<sup>1</sup> Begitu banyaknya masyarakat yang bergantung pada obvitnas, apalagi masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk dan kemajemukan tersebut menjadi menyebabkan potensinya terjadi konflik, disharmoni disintegrasi sosial menjadi semakin membahayakan kerukunan hidup masyarakat Indonesia. Karena itu, kuncinya terletak pada kesepakatan tertinggi atau konsensus sosial tertinggi yang diterima dan diakui bersama sebagai konstitusi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup> Sebagai Negara Hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan. “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

---

<sup>1</sup> Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, [2019, Hlm.11.](#)

<sup>2</sup> Ani Yumarni, Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019, Hlm.3.

kecualinya.<sup>3</sup> Polri memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi undang-undang ini.<sup>4</sup>

Polri sebagai pengemban amanah dari negara untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selalu memperhatikan regulasi, keadilan, dan lingkungan. Sebagai salah satu contoh pengembangan dan perlindungan terhadap obvtas ialah kawasan Kolaka di Sulawesi Tenggara, dalam sebuah tulisan, Martin Roestamy menyatakan bahwa negara memiliki hak menguasai dalam setiap obvtas sehingga dapat melakukan intervensi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan obvtas, dengan mempertimbangkan aspek-aspek regulasi, sosial, ekonomi, dan lingkungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri di daerah tersebut.<sup>5</sup>

Unit Pam Polres Bogor sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan keamanan obvtas seyogyanya dapat melindungi obvtas sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran dalam melindungi obvtas. Unit ini dibentuk oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Baharkam Polri. Secara yurisdiksi, unit ini memiliki wilayah kerja pada wilayah hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Peran unit ini ialah untuk melakukan pengamanan terhadap obvtas. Hal ini dilakukan untuk menjaga obvtas dari ancaman kelompok kriminal

---

<sup>3</sup> Dadang Suprijatna, (2019), Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER, Hlm.106.

<sup>4</sup> Prasetyo, A., Suprijatna, D., & Rumatiga, H. (2024). Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Penindakan Terorisme Oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Karimah Tauhid*, 3(10), 10901-10911.

<sup>5</sup> Roestamy, M. (2024). Juridical Analysis Of State Sovereignty In The Context Of Kolaka Industrial Development In Southeast Sulawesi. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 167-178.

yang sengaja mengancam obvitnas, baik dalam bentuk perampokan, penjarahan, maupun kerusakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa Bogor berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2017

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data melalui kepustakaan dan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan hasil riset orang lain. Dan didukung oleh data empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara<sup>6</sup> dan dokumen yang merupakan data primer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.<sup>7</sup> Langkah terakhir, lakukan analisis dan kesimpulan.<sup>8</sup> Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Devi, S. H. C., & Kelutur, S. (2024). The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 188-195.

<sup>7</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 46.

<sup>8</sup> Husein, S., Yumarni, A., Ma'arif, R. S., Qolyubi, A. T., Syabanti, S., & Khairiyyah, F. H. (2024). Legal Policy Optimizing Premarital Guidance As An Effort To Reduce Divorce Rates. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 230-239.

<sup>9</sup> Syafira, E. L., & Rumatiga, H. (2024). Analysis of Bogor City Regional Regulation Number 11 of 2019 About the Management and Empowerment of Street Vendors. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 97-102.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggul Prakarsa Bogor berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017**

Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan objek vital nasional sektor industri khususnya di PT. Indocement Tunggul Prakarsa Bogor dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017. Beberapa ketentuan dalam Perkap 13/2017 yang berkaitan dengan pemberian bantuan pengamana terhadap obvitnas atau objek tertentu diberikan dalam bentuk:

1. Pemberian jasa pengamanan

Polri merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam melakukan pengamanan, sehingga dalam memberikan jasa pengamanan menggunakan kekuatannya untuk memberikan bantuan pengamanan. Polri dapat menggunakan personil untuk melakukan tugas pengamanan.

Sedangkan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan pemberian jasa pengamanan perlu disediakan guna mendukung pengamanan obvitnas.

2. Jasa manajemen sistem pengamanan

Polri dalam memberikan bantuan pengamanan dilakukan secara terorganisir, direncanakan, dilaksanakan secara baik, dikendalikan, dan melakukan evaluasi.

Dengan menggunakan SOP, personil, dan sarana pendukung polri mampu melaksanakan pemberian pengamanan dan mengendalikan secara baik dan terorganisir. Tentunya dengan mempertimbangkan resiko yang akan timbul dari setiap tindakan.

Bentuk tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pemberian pengamanan kepada pengelola dilaksanakan dalam bentuk:

1. Tindakan pre-emptif

Pada tahap ini polri harus melakukan koordinasi dengan pihak pengelola atau orang yang menjalankan kegiatan dari objek vital nasional. Koordinasi ini dilakukan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pengelola sekaligus memperoleh informasi yang benar terkait wilayah, dan jenis barang yang perlu dilindungi. Dengan melakukan koordinasi pihak polri dapat memahami keadaan lapangan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuannya.

Tindakan pre-emptif ini dapat dimaknai sebagai pra kegiatan pengamanan karena belum ada tindakan menggunakan personel, sarana, dan tindakan lainnya.

2. Tindakan preventif

Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak polri untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan terhadap, kegiatan preventif bisa berupa patroli, pembentuk pos pengamanan, pengaturan terhadap manusia, barang, melakukan pengawalan.

Tindakan preventif sangat diperlukan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi bila sudah terjadi perbuatan atau tindakan yang membahayakan objek vital nasional.

3. Penegakan hukum atau represif

Dalam hukum pidana penegakan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang dilakukan melalui penyelidikan, oleh TKP, penyidikan sampai pada persidangan. Sedangkan dalam pengamanan objek vital penegakan hukum yang dimaksud ialah tindakan menolong orang yang menjadi korban, melakukan

pendataan sanksi, dan mengamankan barang bukti dan pelaku bila ditangkap di TKP.

Dengan melaksanakan pengamanan sebagaimana diuraikan di atas, Pam Obvit Polres Bogor telah menunjukkan perannya dalam mengamankan objek vital nasional di kawasan PT Indocement, yang secara teknis dapat digambarkan sebagai berikut.

Prosedur pengamanan obyek vital oleh Pam Obvit Polres Bogor merujuk pada Perkap 13/2017 yang secara umum berkaitan dengan waktu pelaksanaa, sasaran, dan hasil yang dicapai. Apabila rangkaian kegiatan yang dijelaskan di atas dilaksanakan dengan baik maka akan diharapkan akan menghasilkan model pengamanan obvitnas yang berguna bagi Unit Pam Obvit Polres Bogor.

### **Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengamanan Objek Vital Nasional PT Indocement Unit Pam Obvit Polres Bogor**

Kendala adalah faktor yang menjadi penghambat tercapainya tujuan dari sebuah perencanaan atau kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan oleh Unit Pam Obvit Polres Bogor terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Belum adanya sistem pengamanan yang efektif dalam pengamaman obvitnas

Obvitnas harus memiliki sistem pengamananan yang baik, yang meliputi SDM, Tata kelola, dan pengamanan data. Karena apabila obvitnas dengan mudah di rampok, dirusak, dan dikuasai maka akan berpengaruh pada perekonomian negara atau hajat hidup orang banyak.

2. Kurangnya personil

Personil adalah SDM yang dimiliki oleh polres Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian, khususnya Unit Pam Obvit masih kekurangan personil hal ini karena keterbatasan finansial yang dimiliki oleh polri maupun negara.

### 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung yang harus dimiliki oleh Unit Pam Obvit Polres Bogor guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan. Kegiatan pengamanan tanpa fasilitas seperti kendaraan patroli, perlengkapan atau atribut lapangan.

Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam melindungi obvitnas khususnya PT. Indocement menunjukkan upaya dalam menjaga keamanan obvitas yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Hidayat Rumatiga dengan " Legal Aspect Of Clean Water Needs Process"<sup>10</sup> menyebutkan bahwa kesejahteraan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan industri sehingga dapat dipahami bahwa PT. Indocement juga memperhatikan kesejahteraan. Dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Ani Yumarni dan R. Djuniarsono, dan Romal Suhendar ditemukan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Polsek Cicurug dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara internal terdiri dari anggaran yang tidak mencukupi dalam menangani perkara tindak pidana.<sup>11</sup> Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa hambatan dapat terjadi dari dalam lembaga dan dari luar.

## KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Rumatiga, H., Husein, S., Suryani, D., Aridhayandi, M. R., Suhartini, E., Lukmanul, A., ... & Handayani, D. Legal Aspect Of Clean Water Needs PROCESS. *Development*, 3, 2.

<sup>11</sup> Suhendar, R., Yumarni, A., & Djuniarsono, R. (2024). Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4584-4599.

1. Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa Bogor berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2017 yang meliputi rangkaian kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan atau preemtif dengan berkoordinasi dengan pihak pengelola obvitnas, kegiatan pencegahan yang dilakukan melalui pengawalan barang, patroli, dan kegiatan represif yaitu tindakan menolong orang yang menjadi korban, melakukan pendataan sanksi, dan mengamankan barang bukti dan pelaku bila ditangkap di TKP.
2. Kendala yang ditemui Polri pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa yaitu (1) belum adanya sistem pengamanan yang efektif dalam pengamaman obvitnas. (2) Kurangnya personil, Unit Pam Obvit masih kekurangan personil hal ini karena keterbatasan finansial yang dimiliki oleh polri maupun negara. (3) Sarana dan prasarana yang belum memadai, sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung yang harus dimiliki oleh Unit Pam Obvit Polres Bogor

## REFERENSI

- Ani Yumarni, Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019, Hlm.3.
- Dadang Suprijatna, (2019), Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER, Hlm.106.

Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, [2019, Hlm.11.](#)

Husein, S., Yumarni, A., Ma'arif, R. S., Qolyubi, A. T., Syabanti, S., & Khairiyyah, F. H. (2024). Legal Policy Optimizing Premarital Guidance As An Effort To Reduce Divorce Rates. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 230-239.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 46.

Prasetyo, A., Suprijatna, D., & Rumatiga, H. (2024). Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Penindakan Terorisme Oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Karimah Tauhid*, 3(10), 10901-10911.

Roestamy, M. (2024). Juridical Analysis Of State Sovereignty In The Context Of Kolaka Industrial Development In Southeast Sulawesi. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 167-178.

Rumatiga, H., Husein, S., Suryani, D., Aridhayandi, M. R., Suhartini, E., Lukmanul, A., ... & Handayani, D. Legal Aspect Of Clean Water Needs PROCESS. *Development*, 3, 2.

Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Devi, S. H. C., & Kelutur, S. (2024). The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 188-195.

Syafira, E. L., & Rumatiga, H. (2024). Analysis of Bogor City Regional Regulation Number 11 of 2019 About the Management and Empowerment of Street Vendors. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 97-102.

Suhendar, R., Yumarni, A., & Djuniarsono, R. (2024). Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4584-4599.